



PERTANGGUGJAWABAN PENERIMAAN & PENGELUARAN DANA BANTUAN PARTAI POLITIK TA 2018 DINILAI CUKUP BAIK

BANPARPOL TA. 2018

Berdasarkan UU Nomor 15, tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Pengeluaran dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK RI telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2018 pada partai politik penerima bantuan di 15 wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Bapak Ade Iwan Ruswana menyampaikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah memeriksa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Banparpol 136 partai politik dengan nilai bantuan sebesar Rp16,73 Miliar dan telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp16,72 Miliar. Pengalihan dan pertanggungjawaban dana bantuan partai politik di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ini cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan kesempulan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Banparpol tersebut yaitu:

- a. Sesuai kriteria, sebanyak 67 partai politik (49,84%);
- b. Sesuai kriteria dengan pengecualian, sebanyak 57 partai politik (41,91%);
- c. Tidak sesuai, sebanyak 3 partai politik (2,24%);
- d. Tidak menyatakan kesempulan, sebanyak 10 partai politik (7,35%)

Beberapa kendala/potential yang ditemukan BPK di antaranya adalah bukti LPJ Banparpol tidak lengkap dan tidak sah dan penggunaan dana banparpol yang tidak sesuai prioritas (pendidikan politik dan operasional sekretariat).

BPK mengungkapkan pada tahun-tahun mendatang pertanggungjawaban Banparpol semakin baik, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu diperlukan peran aktif Badan Kesbangpol untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada partai politik di wilayah masing-masing.

Komis (R) (2018) bertempat di auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ade Iwan Ruswana menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2018 kepada 15 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Daerah dan Politik.



ENERGI, SINERGI, PRESTASI

DALAM RANGKA HUT BPK RI KE-72

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan upacara Peringatan Hari Kebangkitan ke-72 pada hari Senin, 21 Januari 2019, pukul 08.00 WIB di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ade Iwan Ruswana dan sebagai komandan upacara Bapak Samsul.



Rangkaian kegiatan dalam upacara ini diawali dengan pembacaan salawat saharah perkemahannya BPK RI, BPK RI dibacakan pada tanggal 1 Januari 1947 yang saat ini harus memiliki 3 pegawai di Mangrove, Jawa Tengah. Dalam era reformasi, BPK RI mendapatkan dukungan lambaian yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai satu-satunya lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan negara yang independen dan profesional. Saat ini BPK RI berkedudukan di Jl. Catur Salsabito No 31, Jalan Tuanku.

Selanjutnya kegiatan upacara dilakukan pengibaran bendera, pembacaan naskah Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945 serta pembacaan pidato Ketua BPK RI oleh inspektur upacara. Dalam hari peringatan, Ketua BPK RI menyampaikan tema peringatan HUT BPK RI ke-72, yaitu Energi, Sinergi, Prestasi serta mengimbau kepada seluruh pegawai BPK untuk memegang teguh nilai dasar: independensi, integritas dan profesionalisme dengan menajaga kemandirian kalkulator sehingga dapat menjaga kepercayaan rakyat kepada BPK.

Dalam upacara tersebut, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, menginspirasikan Tanda Kehormatan. Selanjutnya, Karas menyampaikan penghargaan kepada pegawai teladan Tahun 2019 untuk kategori pegawai fungsional, pegawai purnawajid dan HT. Upacara ditutup dengan menyanyikan hymne dan mars BPK serta pembacaan doa.

FAMILY GATHERING

Dalam rangka memperingati tali silaturahmi keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 dilaksanakan kegiatan Family Gathering yang bertempat di lingkungan kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pegawai beserta keluarga.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ade Iwan Ruswana dengan pedoman bahwa ke-udara. Dalam sambutannya, Bapak Ade menyampaikan pesan bahwa acara family gathering ini selain untuk memperingati HUT BPK RI ke-72, namun juga sebagai sarana untuk menjalin keakraban antar sesama pegawai dan keluarga.

Adapun rangkaian kegiatan family gathering tersebut yaitu jalan santai, senam pagi bersama, lomba-lomba, pembagian doorprize dan hadiah lomba dengan hiburan. Acara ditutup dengan bersantap siang bersama dengan hiburan live music.

Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

TAHETA

Edisi 1/2019

Family Gathering
HUT BPK RI Ke-72
 Ziarah Makam H. Abdullah Zainie
 Diklat **Metode Sampling**
 LKPD *Unaudited* TA. 2018
 Banparpol TA. 2018

DIKLAT METODE SAMPLING DAN TEKNIK PEMERIKSAAN BELANJA INFRASTRUKTUR DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TAHUN ANGGARAN 2018

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Senin-Jumat, 11-15 Januari 2019, bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dilaksanakan diklat "Peningkatan profesional dengan mengambil tema "Diklat Metode Sampling dan Teknik Pemeriksaan Belanja Infrastruktur dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019".

Diklat diawali dengan Pembukaan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, didampingi Kepala Subuditorat Kahang I dan Kepala Subuditorat Kahang II. Diklat ini diikuti oleh 50 orang pegawai. Pada hari terakhir diklat, dilaksanakan evaluasi online oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK. Adapun tujuan dilaksanakan diklat ini adalah memberikan pemahaman kepada para pemeriksa di bidang teknik pemeriksaan infrastruktur dan pengambilan sampling, dengan harapan agar kualitas hasil pemeriksaan dapat meningkat.



PENGAMBILAN SAMPAH PNS BPK

Senin, 28 Januari 2019 pada pukul 08.00 WIB, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pengambilan sampah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertempat di auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengambilan sampah PNS ini dilaksanakan untuk 27 CPNS di lingkungan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah.

Acara diawali oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, para pejabat struktural di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, para undangan, rohaniawan dan saksi. Pengambilan sampah PNS tersebut dilaksanakan sesuai masing-masing agama yang diikut. CPNS dan diumumkan dengan pesan datarungan Berita Acara Pengambilan Sampah Pegawai Negeri Sipil. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan agar para PNS selalu ingat akan jerih dan sampah PNS serta menghormati hubungan yang baik antar pegawai sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif.



LIMA BELAS PEMERINTAH DAERAH MENYERAHKAN LKPD TA 2018 (UNAUDITED) DENGAN TEPAT WAKTU

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menyerahkan LKPD TA 2018 (Unaudited) tepat waktu. Laporan keuangan yang disampaikan tersebut akan diperiksa oleh Tim Pemeriksa untuk diberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah berharap agar Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan baik kepada Tim Pemeriksa BPK untuk kelancaran kegiatan pemeriksaan.

Salah satu rangkaian acara dalam rangka peringatan HUT BPK RI ke 73, pada hari Selasa, 8 Januari 2019, dilaksanakan kegiatan serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) akan direview oleh Tim review pembekalan dan tim review pusat. Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi TA 2018 akan dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah.

SOSIALISASI APLIKASI SIAP BANPARPOL

Pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019, bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan sosialisasi SIAP Banparpol, yang diikuti oleh oleh seluruh pemeriksa, dengan narasumber dari Biro Teknologi dan Informasi BPK Pusat.

SIAP Banparpol ini merupakan salah satu implementasi Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SIAP) yang dikembangkan oleh BPK. Latar belakang dikembangkan oleh BPK. SIAP Banparpol ini adalah untuk mempermudah pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Banparpol.



PENGARAHAN KEPALA PERWAKILAN KEPADA PARA PEMERIKSA TERKAIT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TERINTEKSI ATAS LKPD TA 2018

Sebagai amanat Undang-Undang BPK, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, setelah LKPD TA 2018 unaudited diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah maka akan dilaksanakan pemeriksaan atas LKPD TA 2018 tersebut pada 15 Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mempermudah tahapan pemeriksaan tersebut, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah memberikan pengarahan kepada seluruh pemeriksa pada hari Selasa, 20 Maret 2019, bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam arahannya, Kepala Perwakilan memberikan strategi pemeriksaan khususnya bagi pemeriksa yang baru agar dapat menjalankan tugas pemeriksaan sesuai prosedur pemeriksaan dalam SPKN dan mempersiapkan diri agar lebih profesional. Pesan lain yang disampaikan adalah agar para pemeriksa dapat menjaga nama baik BPK, menjunjung tinggi integritas, independensi dan profesionalisme. Dengan jumlah SDM dan waktu pemeriksaan terbatas diharapkan pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan secara efektif dan tepat sasaran.

Selanjutnya Kepala Perwakilan menekankan bahwa di akhir periode pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) akan direview oleh tim review pembekalan dan tim review pusat. Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi TA 2018 akan dilaksanakan dalam sidang paripurna BPKD Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten/kota TA 2018 akan dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah.



ZIARAH PIMPINAN BPK RI KE MAKAM WAKIL KETUA BPK RI PERIODE TAHUN 2004 - 2009

Adapun pimpinan daerah yang hadir yaitu Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, Bupati Kotawaringin Barat, Ibu Hj. Nurhidayah, Bupati Lamau, Bapak H. Hendra Lesmana, Bupati Sukamara, H. Winu Subagio, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Fahrial Fatah, Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Sapta Nugroho, Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, para Kepala SKPD serta Kepala Kantor Alimuddin H-Abdullah Zaini.

Selanjutnya Kepala Perwakilan menekankan bahwa di akhir periode pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) akan direview oleh tim review pembekalan dan tim review pusat. Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi TA 2018 akan dilaksanakan dalam sidang paripurna BPKD Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten/kota TA 2018 akan dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah.



Bertindak sebagai Impetektor Upacara, Bapak Novy G.A. Pelenkahu dalam sambutannya, Bapak Novy menyampaikan tentang ketekunan Alim. H-Abdullah Zaini dalam kalembagaan, berorganisasi, serta karakter beliau yang patut diteladani.